

TESIS

EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016-2018 DENGAN MODEL CIPP (*CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT*) PADA PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Disusun Oleh:

NAMA : HASTI KUSUMAWATI
NOMOR POKOK : 1763001049
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.APN)



**Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN
Jakarta
2020**



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

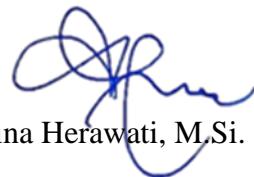
Judul Tesis

**“EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016-2018
DENGAN MODEL CIPP (*CONTEXT, INPUT, PROCESS,
PRODUCT*) PADA PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN”**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, Desember 2020

Pembimbing



(Dr. A. Rina Herawati, M.Si.)

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Hasti Kusumawati
Nomor Pokok : 1763001049
Program Studi/Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara/Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Evaluasi Pelaporan Keuangan Tahun 2016-2018 dengan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan

telah mempertahankan Tugas Akhir di hadapan Tim Pengaji

Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara

Politeknik STIA LAN Jakarta

Hari : Sabtu
Tanggal : 19 Desember 2020
Pukul : 09.00-10.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Bambang Riyanto, M.Pd.

Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.

Pembimbing/Anggota : Dr. A. Rina Herawati, M.Si

Anggota : Dr. Asropi, M.Si.



Tanda Tangan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasti Kusumawati

NPM : 1763001049

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Evaluasi Pelaporan Keuangan Tahun 2016-2018 dengan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Desember 2020

Penulis,



Hasti Kusumawati

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah dikaruniakan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Evaluasi Pelaporan Keuangan Tahun 2016-2018 dengan Model Cipp (*Context, Input, Process, Product*) pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tesis ini telah disusun sesuai dengan arahan dan petunjuk yang ada dalam pedoman penulisan tesis Program Magister Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai salah satu persyaratan akademis.

Tesis ini dapat diselesaikan atas bimbingan dari Dosen Pembimbing Ibu Dr. A. Rina Herawati, M.Si., yang sejak awal hingga penyelesaian akhir tesis. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu, tenaga, dan pikiran Ibu Dr. A. Rina Herawati, M. Si. Yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan baik. Dalam kesempatan ini, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Politeknik STIA LAN Jakarta
3. Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir ini
4. Keluarga tercinta, yang terus memanjatkan doa dan mendukung Penulis untuk terus belajar dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan
5. Seluruh teman-teman Manajemen Keeuangan Negara Angkatan 2017, yang telah berjuang bersama-sama dan saling memotivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.

Dalam penulisan tesis ini Penulis menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam segi Bahasa dan sitematika penulisan yang masih belum sempurna, untuk itu Penulis sangat berharap sumbang saran dari pembaca agar penulisan dapat lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan pustaka tentang Evaluasi Pelaporan Keuangan Tahun 2016-2018 dengan Model Cipp (*Context, Input, Process, Product*) pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di masyarakat, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, dan Politeknik STIA LAN Jakarta.

Hormat saya,

Jakarta, Desember 2020



Hasti Kusumawati

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

ABSTRAK

HASTI KUSUMAWATI, 1763001049

EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016-2018 DENGAN
MODEL CIPP (*CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT*) PADA PUSAT
PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

118 Halaman, 5 Bab, 8 Tabel, dan 3 Gambar

Daftar Pustaka: 18 Buku, 10 Jurnal, 9 Peraturan, 5 Lain-lain

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan keuangan yang berkualitas di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana evaluasi pelaporan keuangan pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Metode yang digunakan adalah kskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian : (1) Aspek *Context* yaitu kesesuaian tujuan dan sasaran pelaporan keuangan pada Pusat Penelitian Kebijakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja. (2) Aspek *Input* yaitu sumber daya dalam pelaporan keuangan yang terdiri dari sumber daya manusia dan sarana prasarana (komputer, jaringan internet, dan fasilitas perkantoran) sudah memadai untuk mendukung pelaporan keuangan yang tepat waktu. (3) Aspek *Process* yaitu dalam proses pelaksanaan pelaporan keuangan masih ditemukan masalah yaitu

terlambatnya pelaporan BMN, pencatatan BMN yang belum tertib administrasi, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara perencana, pelaksana, dan operator aplikasi , peran pimmpinan yang masih kurang, serta pengawasan SPI yang masih belum optimal (4) Aspek *Product* yaitu laporan keuangan Pusat Peneitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan berkualitas (relevan dan andal) dan bermanfaat sebagai sumber informasi dalam keputusan manajemen.

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) Koordinasi antar pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara periodik. (2) Evaluasi kinerja pegawai secara intensif pada proses bisnis pelaporan keuangan. (3) Mengganti personil anggota SPI dengan pegawai yang berasal dari jabatan fungsional umum. (4) Menambah jumlah pegawai dan rotasi jabatan sebagai pengurus dan pengelola operator aplikasi BMN.

Kata kunci : Evaluasi, Pelaporan Keuangan, Model CIIPP

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

ABSTRACT

HASTI KUSUMAWATI, 1763001049

Financial Reporting Evaluation In Between 2016-2018 With The CIPP Model (Context, Input, Process, Product) at the Research Center for Educational and Cultural Policy

118 Pages, 5 Chapters, 8 Tables, dan 3 Pictures

Bibliography: 18 Books, 10 Journals, 9 Regulations, 5 Others

This study aims to determine the implementation of quality financial reporting at the Research Center for Educational and Cultural Policy, Research and Development Agency, Ministry of Education and Culture using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. The focus of the problem under study is how to evaluate financial reporting at the Center for Research on Education and Culture Policy, Research and Development Agency, Ministry of Education and Culture.

The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques are interviews and document review. The results of the study: (1) Context aspects, namely the suitability of the objectives and targets of financial reporting at the Center for Policy Research with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, namely for the interests of accountability, management, transparency, and performance evaluation. (2) Input Aspect, namely resources in financial reporting consisting of human resources and infrastructure (computers, internet networks, and office facilities) are sufficient to support timely financial reporting. (3) Process aspect, namely in the process of implementing financial reporting, problems are still found, namely the late BMN

reporting, BMN records that are not yet orderly in administration, lack of coordination and communication between planners, implementers, and application operators, the role of leaders is still lacking, and supervision of SPI which is still not optimal (4) Product Aspects, namely the financial statements of the Quality Education and Culture Policy Research Center (relevant and reliable) and useful as a source of information in management decisions.

Suggestions that can be given are as follows: (1) Coordination between stakeholders which is carried out periodically. (2) Intensive evaluation of employee performance in the financial reporting business process. (3) Replacing personnel of SPI members with employees from general functional positions. (4) Increase the number of employees and rotate positions as administrators and managers of BMN application operators.

Keywords: Evaluation, Financial Reporting, CIPP Model

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I	1
PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan.....	15
1. Keuangan Negara	15
2. Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	18
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	28
4. Model Evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP)	32
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Konsep Kunci.....	42
D. Model Berpikir.....	44
E. Pertanyaan Penelitian.....	45
BAB III	46
METODE PENELITIAN.....	46

A. Metode Penelitian.....	46
B. Teknik Pengumpulan Data.....	47
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN.....	56
1. Aspek <i>Context</i>	65
2. Aspek <i>Input</i>	74
3. Aspek <i>Process</i>	83
4. Aspek <i>Product</i>	106
BAB V.....	112
SIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. Kesimpulan	112
1. Aspek <i>Context</i>	112
2. Aspek <i>Input</i>	113
3. Aspek <i>Process</i>	114
4. Aspek <i>Product</i>	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	124
A. Pedoman Wawancara.....	124
B. Pedoman Telaah Dokumen	127
C. Hasil Wawancara	128

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Neraca Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Per 31 Desember 2016, 2017, dan 2018.....	5
Tabel 2	Laporan Realisasi Anggaran Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Per 31 Desember 2016, 2017, dan 2018.....	10
Tabel 3	Laporan Operasional Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Per 31 Desember 2016, 2017, dan 2018.....	11
Tabel 4	Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 5	Daftar <i>Key Informant</i>	50
Tabel 6	Distribusi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan..	63
Tabel 7	Distribusi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.....	64
Tabel 8	Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Model Berpikir.....
Gambar 2	Struktur Organisasi Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.....
Gambar 3	Struktur Organisasi Unit Akuntansi.....



POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berusaha untuk mewujudkan terciptanya *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi pemerintahan. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar menyelenggarakan pemerintahan yang baik sejalan dengan peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan pendidikan masyarakat serta meningkatnya teknologi informasi. Mudahnya penyebaran informasi pada akhir-akhir ini meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kepekaan pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dapat dilihat dari respon untuk melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Good governance pertama kali digiatkan oleh Pemerintah Indonesia sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yang menuntut terjadinya reformasi pemerintahan. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik disebut dengan *governance* (pemerintah atau kepemerintahan) sedangkan praktik baiknya disebut dengan *good governance*. Pelaksanaan *good governance* merupakan sarana mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua dari delapan karakter untuk terwujudnya *good governance*. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah membutuhkan peran penting informasi sebagai sarana komunikasi efektif dengan masyarakat sekitarnya. Pada kondisi tersebut, penyajian informasi yang utuh akan menciptakan transparansi dan selanjutnya akan mewujudkan akuntabilitas publik. Sebagai organisasi publik, pemerintah mengelola dana masyarakat untuk mencapai tujuannya. Untuk itu pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya melalui laporan keuangan. Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan membutuhkan standar akuntansi untuk menjadi acuan dan pedoman. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD atau pengelolaan keuangan negara baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah berupa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin relevansi dan keandalan informasi-informasi yang disajikan di dalamnya.

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional

pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan-kepentingan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja. Peran laporan keuangan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan tersebut diatur dalam PP No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut:

1. Terkait dengan kepentingan akuntabilitas, laporan keuangan memiliki peran untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Laporan keuangan berperan dalam kepentingan manajemen untuk membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Laporan keuangan berperan dalam kepentingan transparansi karena memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasar pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Laporan keuangan berperan dalam keseimbangan antargenerasi dengan membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dana apakah generasi mendatang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Laporan keuangan mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Setiap instansi pemerintah atau entitas pelaporan memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai. Kinerja instansi tercermin dalam laporan keuangan yang disusun pada periode tertentu. Dalam penyusunannya, laporan keuangan harus mampu memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan menyeluruh agar terhindar dari kesalahan atas pengelolaan keuangan baik berupa kesalahan atas pencatatan maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban instansi.

Dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tanggal 08 Juni 2018 menyebutkan bahwa “selama lima tahun berturut-turut Kemendikbud mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan”. Opini WTP diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 Kemendikbud telah menyelesaikan rekomendasi sebanyak 63,03%. Kemendikbud merupakan salah satu kementerian yang mendapat opini WTP tetapi masih memiliki temuan pada hasil pemeriksaan. Berdasarkan Ikhtisar

Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK Semester II tahun 2017, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 18 permasalahan dengan nilai sebesar Rp2.880.190.000,00 sedangkan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dilaporkan tidak ada temuan BPK. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari 2 permasalahan terkait kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp511.260.000,00, 3 permasalahan terkait kelebihan pembayaran selain kekurangan volume senilai Rp1.014.640.000,00, 1 permasalahan terkait spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai dan 12 permasalahan terkait lain-lain permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp905.420.000,00.

Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2017 terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga memberikan opini WTP terhadap 4 laporan keuangan. Kemendikbud merupakan salah satu Kementerian yang mendapat opini WTP, tetapi masih memiliki temuan hasil periksaan. Pada umumnya hasil temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap ketentuan pengendalian intern. Hasil temuan itu membuktikan bahwa laporan keuangan Kemendikbud yang disajikan belum dapat memberikan informasi yang berkualitas bagi para penggunanya, khususnya belum dapat menyajikan informasi yang andal dan tepat waktu. Mengingat bahwa informasi yang andal dan tepat waktu merupakan dasar pengambilan keputusan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas pelaporan keuangannya.

Opini WTP akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material atau mampu memberikan informasi

yang apa adanya serta menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik (Majalah Treasury, 2017). Opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara. WTP menunjukan perbaikan terus menerus di bidang pengelolaan keuangan negara.

Laporan keuangan menggambarkan kualitas pengelolaan suatu entitas. Jika laporan keuangan suatu entitas memperoleh opini WTP maka dapat dimaknai secara umum tata kelola keuangannya adalah baik. Dalam hal ini Kemendikbud sebagai entitas pelaporan terdiri dari 8 unit utama yang membawahi satuan-satuan kerja. Laporan keuangan Kemendikbud merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kemendikbud yang meliputi eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Pada tahun 2015, jumlah satuan kerja (satker) yang ada di lingkup Kemendikbud adalah 455 satker, menurun pada tahun 2016 menjadi 368 satker dan pada tahun 2017 menjadi 365 satker (Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud). Laporan keuangan antarsatker yang ada di Kemendikbud bisa memiliki tingkat kualitas yang berbeda-beda.

Laporan keuangan yang beropini WTP dapat juga digunakan oleh pemerintah untuk tujuan manajerial dan pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasar PP. No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pengambilan keputusan yang dilakukan tentunya didasarkan atas informasi-informasi yang relevan. Begitu pula dengan kebijakan

pengelolaan keuangannya, seharusnya didasarkan pada akuntansi atau laporan keuangan yang telah dibuat oleh entitas yang bersangkutan.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) sebagai salah satu Pusat dari Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mencapai visi dan menjalankan misinya, Puslitjakdikbud mendapatkan anggaran untuk digunakan dan dialokasikan dalam kegiatan-kegiatan penelitian serta kegiatan lain seperti layanan kantor dan dukungan manajemen termasuk di dalamnya belanja barang, belanja jasa, dan belanja pegawai. Puslitjakdikbud tidak melakukan belanja modal karena anggaran untuk belanja modal diserahkan kepada sekretariat Balitbang. Puslitjakdikbud memerlukan keputusan manajerial yang tepat untuk menghasilkan perencanaan terkait alokasi anggaran untuk mencapai visi dan menjalankan misinya.

Laporan keuangan memiliki peranan yang penting seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terutama terkait dengan kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja. Untuk itu perlu dibuat laporan keuangan yang berkualitas yang mampu memberikan informasi yang andal dan relevan. Ketaatan terhadap peraturan serta kondisi yang ada dalam organisasi seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, maupun teknologi informasi yang digunakan berpengaruh pada proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan juga menghadapi berbagai kendala yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan diharapkan mampu menyajikan informasi bagi pengguna tentang indikasi sumber daya telah telah dipakai sesuai dengan anggaran atau tidak. Melalui laporan keuangan bisa diketahui tentang ketersediaan sumber daya sesuai

dengan ketentuan, termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan berperan dalam pengambilan keputusan manajerial, apakah tepat dengan apa yang menjadi visi dan misinya.

Laporan keuangan Puslitjakdikbud Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Neraca
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Per 31 Desember 2016, 2017, dan 2018
(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN 1	JUMLAH		
	2018 2	2017 3	2016 4
ASET			
ASSET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4.104.100	10.624.848	0
Persediaan	228.990.000	49.753.350	85.290.000
JUMLAH ASSET LANCAR	233.094.100	60.378.198	85.290.000
ASSET TETAP			
Peralatan dan mesin	4.280.078.293	3.053.153.293	3.591.378.051
Aset Tetap lainnya	67.114.000	67.114.000	67.114.000
Akumulasi Penyusutan	(3.997.478.111)	(2.754.191.147)	(3.020.128.237)
JUMLAH ASSET TETAP	349.714.182	366.076.146	638.363.814
ASSET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	2.284.363.169	2.284.363.169	2.284.363.169
Aset Lain-lain		538.224.758	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	(2.284.363.169)	(2.822.587.927)	(2.284.363.169)
JUMLAH ASSET LAINNYA	0	0	0
JUMLAH ASSET	582.808.282	426.454.344	723.653.814
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			0
Utang kepada Pihak Ketiga	1.276.274.322	0	37.058.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0	37.058.000
JUMLAH KEWAJIBAN	1.276.274.322	0	37.058.000
EKUITAS			
Ekuitas	(693.466.040)	426.454.344	686.595.814
JUMLAH EKUITAS	(693.466.040)	426.454.344	686.595.814
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	582.808.282	426.454.344	723.653.814

Sumber : Laporan Keuangan Puslitjakdikbud

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Per 31 Desember 2016, 2017, dan 2018
(dalam Rupiah)

URAIAN	2018					2017					2016				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENERIMAAAN NEGARA	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penerimaan Perpajakan	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	11.915.000	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
HIBAH	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	-	11.915.004	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
BELANJA NEGARA	0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	
Rupiah Murni	38.398.321.000	35.952.015.095	(2.446.305.905)	93,63	34.524.157.000	31.159.539.647	(3.364.617.353)	90,25	45.809.145.000	38.255.628.125	(7.553.516.875)	83,51			
Belanja Pegawai	15.528.707.000	13.186.186.371	(2.342.520.629)	84,91	15.284.284.000	13.758.118.829	(1.526.165.171)	90,01	9.313.830.000	9.136.337.823	(177.492.177)	98,09			
Belanja Barang	22.869.614.000	22.765.828.724	(103.785.276)	99,55	19.239.873.000	17.401.520.818	(1.838.352.182)	90,45	36.495.315.000	29.119.290.302	(7.376.024.698)	79,79			
Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belanja Barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH BELANJA	38.398.321.000	35.952.015.095	0	0	34.524.157.000	31.159.539.647	(3.364.617.353)	90,25	45.809.145.000	38.255.628.125	(7.553.516.875)	83,51			
PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Laporan Keuangan Puslitjakdikbud

Tabel 3
Laporan Operasional
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Per 31 Desember 2016, 2017, dan 2018
(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		
	2018	2017	2016
1	2	3	4
-KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Jumlah Pendapatan Negara Bukan pajak	0	0	0
PENDAPATAN HIBAH			
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	14.468.981.441	13.710.435.981	9.173.395.823
Beban Persediaan	137.171.350	189.372.410	205.187.675
Beban Barang dan Jasa	15.103.620.442	11.897.543.341	22.302.924.750
Beban Pemeliharaan	396.073.757	379.484.924	0
Beban Perjalanan Dinas	6.950.063.025	4.970.656.793	6.731.075.552
Beban Penyusutan dan Amortisasi	179.219.108	272.287.668	2.599.721.437
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	37.235.129.123	31.419.781.117	41.012.305.237
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(37.235.129.123)	(31.419.781.117)	(41.012.305.237)
-KEGIATAN NONOPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NONLANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar	2.700.000	0	0
Beban Pelepasan Aset Nonlancar	0	0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	2.700.000	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESIAKAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	0		
Pendapatan dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya		43.737.079	135.481.871
Beban dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	9.551.500	43.737.079	135.481.871
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	12.251.500	43.737.079	135.481.871
-POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(37.222.877.623)	(31.376.044.038)	(40.876.823.366)

Sumber : Laporan Keuangan Puslitjakdikbud

Dari laporan keuangan Puslitjakdikbud seperti yang telah tersebut di atas, terdapat permasalahan yang ditemui terkait dengan karakteristik kualitatif normatif pada laporan keuangan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Terdapat perbedaan nilai persediaan (barang habis pakai) antara yang ada di laporan keuangan dengan cek fisik berupa bukti pengeluaran atau tanda terima.

2. Angka penyusutan aset yang disajikan dalam laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi riilnya karena angka penyusutan tersebut didapat dari rumus yang dibuat oleh Kementerian Keuangan.
3. Terlambatnya penyampaian data Barang Milik Negara sehingga mengakibatkan terlambatnya proses rekonsiliasi internal dengan data keuangan dan selanjutnya akan berdampak pada proses rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara (KPPN) sehingga akan berdampak pada penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu.
4. Pengajuan data Kartu Pengawasan (Karwas) ke KPPN khususnya mekanisme pembayaran langsung (LS) sering mengalami kendala berupa penolakan terkait dengan kesalahan input data penyedia dan sering terjadi *update* aplikasi.

Sehingga dari kondisi tersebut laporan keuangan Puslitjakdikbud Tahun 2016-2018 dapat dikatakan belum berkualitas. Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan Puslitjakdikbud belum berkualitas maka diperlukan suatu evaluasi mulai dari perencanaan penyusunan laporan keuangan sampai dengan laporan yang dihasilkan dan kemanfaatannya. Hasil akhir pelaporan keuangan berupa laporan keuangan turut dipengaruhi bagaimana perencanaan maupun proses penyusunannya maka evaluasi perlu dilakukan mulai dari tahap rencana hingga tahap akhir.

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) merupakan evaluasi yang dilakukan pada empat komponen yaitu evaluasi pada *context/konteks*, evaluasi pada *input/masukan*, evaluasi pada *process/proses*, dan evaluasi pada *product/produk*. Empat komponen tersebut merupakan bagian dari sebuah program kegiatan. Model evaluasi CIPP memandang program yang dievaluasi sebagai suatu sistem. Model ini bertitik tolak pada pandangan bahwa

keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana dan lingkungan, tujuan dan sasaran, sumber daya, strategi, petunjuk pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan program. Model evaluasi CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, perusahaan dan sebagainya serta dalam berbagai jenjang baik itu program, proyek maupun institusi. Model evaluasi CIPP bersifat linier artinya evaluasi masukan harus didahului evaluasi konteks, evaluasi proses harus didahului evaluasi masukan, dan evaluasi produk harus didahului oleh evaluasi proses. Keunggulan model evaluasi ini dibanding dengan model evaluasi yang lain adalah memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dalam proses evaluasinya yang bertujuan memberikan gambaran dan penilaian yang detail mengenai suatu program mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan produk dari program. Model CIPP ini dipilih berdasarkan cara kerjanya yang memandang evaluasi sebuah sistem artinya tujuan dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki program serta dapat mengevaluasi semua komponen yang terdiri dari konteks, input, proses dan produk yang ada dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan evaluasi tentang pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh Puslitjakdikbud dari tahap perencanaan hingga tahap akhir. Atas dasar itu, judul dalam penelitian ini adalah “Evaluasi Pelaporan Keuangan dengan Model CIPP (*Context, Input, Process, Output*) di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2018”. Penelitian ini difokuskan pada persiapan, pelaksanaan penyusunan dan kemanfaatan dari laporan keuangan di Puslitjakdikbud.

B. Rumusan Permasalahan

Laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya berupa informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun untuk keperluan pemeriksaan, untuk itu diperlukan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan berkualitas di mana informasi di dalamnya memiliki dua karakteristik utama yaitu relevan dan reliabilitas. Penelitian ini akan berfokus pada permasalahan :

Bagaimana evaluasi pelaporan keuangan tahun 2016-2018 dengan menggunakan CIPP (Context, Input, Process, Product) Pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan pada fokus permasalahan yang ditetapkan, yaitu :

1. Untuk mengenali berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Puslitjakdikbud dalam lingkup konteks.
2. Untuk mengenali berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Puslitjakdikbud dalam lingkup masukan.
3. Untuk mengenali berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Puslitjakdikbud dalam lingkup proses.
4. Untuk mengenali berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Puslitjakdikbud dari lingkup produk serta kemanfaatannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian terhadap dunia akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang manajemen keuangan negara, khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah.

2. Manfaat penelitian terhadap dunia praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi bagi pimpinan sebagai solusi alternatif dalam perbaikan sistem yang ada di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam hal pelaporan keuangan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sebagai karakteristik *good governance*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran yang diuraikan merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah di paparkan pada Bab IV Hasil Penelitian yang dikaitkan untuk menjawab pertanyaan pada fokus permasalahan di Bab I. Selain simpulan juga memuat uraian tentang saran sebagai masukan untuk berbagai pihak yang mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini yaitu kelompok akademisi dan praktisi.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dianalisis oleh Peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan pada Evaluasi Pelaporan Keuangan Tahun 2016-2018 Dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) Pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Aspek *Context*

Pelaporan Keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek konteks dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tujuan : Pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada penggunanya terkait alokasi dan tingkat penyerapan anggaran selama periode berjalan sehingga informasi dapat

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Dari pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dapat diketahui pula bahwa Puslitjakdikbud tidak memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- b. Sasaran : Sasaran dalam pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dibedakan berdasar kepentingannya baik internal maupun eksternal. Untuk kepentingan internal pelaporan keuangan berperan dalam akuntabilitas, manajemen, dan evaluasi kinerja satuan kerja, sedangkan untuk kepentingan eksternal berperan pada transparansi.

2. Aspek Input

Pelaporan Keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek input dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia: Sumber daya manusia yang menunjang dalam pelaporan keuangan tergantung pada kompetensinya dalam menguasai aplikasi karena sistem kerja keuangan pemerintah pada masa sekarang menggunakan sistem aplikasi. Adanya update aplikasi keuangan secara berkala menuntut pegawai untuk menguasai aplikasi baru. Untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menguasai aplikasi tersebut, pegawai ditugaskan untuk mengikuti pendidikan kilat. Jumlah pegawai yang menguasai aplikasi keuangan terbatas, sehingga lancarnya pelaksanaan pelaporan keuangan tergantung pada kehadiran pegawai tersebut. Selain itu untuk menyelesaikan pekerjaan pada periode tertentu contohnya pada saat batas akhir pertanggungjawaban, pegawai membutuhkan tambahan waktu.

- b. Sarana dan Prasarana: Sarana prasarana yang dimiliki Puslitjakdikbud terkait dengan fasilitas kantor dalam mendukung lancarnya pelaporan keuangan. Fasilitas kantor berupa tempat kerja, peralatan komputer, dan jasa internet dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan oleh pegawai.
- c. Strategi : Pelaksanaan pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

3. Aspek Process

Pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek proses sebagai berikut:

- a. Proses Rekonsiliasi : Unsur dalam proses pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud meliputi kegiatan rekonsiliasi keuangan dan BMN, koordinasi antarpegawai, peran pemimpin dalam menyelesaikan masalah, ketataan pada peraturan, dan hasil pengawasannya baik atau tidak terjadi penyimpangan. Rekonsiliasi keuangan dan BMN di Puslitjakdikbud melalui 2 tahapan, yaitu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Pada tahap rekonsiliasi internal belum berjalan sesuai dengan peraturan. Hal ini disebabkan karena terlambatnya pencatatan transaksi khususnya pada pencatatan BMN karena data yang tidak lengkap. Sedangkan pada rekonsiliasi eksternal pelaporan keuangan sudah sesuai jadwal meskipun di batas akhir waktu penutupan.
- b. Koordinasi : Koordinasi pegawai dalam pelaporan keuangan dinilai masih kurang. Terlambatnya pencatatan transaksi BMN disebabkan kurang koordinasi antara

pelaksana belanja dan operator aplikasi SIMAK BMN untuk mencatat barang yang masuk sedangkan untuk barang yang keluar atau digunakan juga tidak dikoordinasikan dengan baik. Bahkan tidak ada pegawai yang bertugas melakukan pencatatan barang keluar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan BMN di Puslitjakdikbud masih belum tertib administrasi dan berdampak pada ketepatan waktu pada pelaporan keuangan secara keseluruhan.

- c. Pimpinan : Peran pimpinan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi juga masih kurang. Rapat evaluasi maupun koordinasi dalam pelaporan keuangan Puslitjakdikbud jarang dilakukan bahkan tidak pernah dilakukan, sehingga hal ini berdampak pada kesalahan yang terus berulang terutama pada pencatatan BMN. Pengelolaan keuangan di Puslitjakdikbud secara umum sudah mematuhi Peraturan Menteri Keuangan, hanya bermasalah pada ketepatan waktu pelaporan keuangan dan tidak tertib administrasi.
- d. Pengendalian Internal: Tujuan pengawasan yang dilakukan Satuan Pengawas Internal adalah untuk menghindari temuan dari pemeriksaan pihak eksternal dan mampu menghasilkan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan keuangan yang tertib administrasi dan peraturan. Masih adanya temuan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan pada pelaporan keuangan Puslitjakdikbud menunjukkan tidak optimalnya Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan karena tugas SPI bukan tugas utama pegawai melainkan tugas tambahan dari Kepala Balitbang, sehingga ketika anggota SPI

melaksanakan tugas, waktunya bersamaan dengan tugas utamanya maka akan memprioritaskan tugas utamanya terlebih dahulu. Anggota SPI yang ada sekarang berasal dari jabatan fungsional peneliti dan perekayasa.

4. Aspek *Product*

Pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek produk sebagai berikut:

- a. Kualitas Laporan Keuangan : Produk pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud meliputi laporan keuangan dalam satu periode akuntasi. Laporan keuangan Puslitjakdikbud sudah dapat dinilai relevan dan andal. Di mana informasi di dalamnya sudah digunakan manajemen untuk membuat keputusan. Laporan keuangan di Puslitjakdikbud digunakan untuk kebutuhan manajemen terkait perencanaan anggaran dan penyusunan kegiatan tahun berikutnya serta evaluasi kinerja dalam hal penyerapan anggaran. Di Puslitjakdikbud dibutuhkan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan dalam 3 bidang dan didukung oleh layanan perkantoran. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran pada kegiatan yang efektif untuk dilaksanakan pada periode berikutnya meliputi 3 bidang tersebut berikut layanan perkantoran.
- b. Manfaat: Laporan keuangan Puslitjakdikbud digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan manajemen, sementara pegawai belum memberikan perhatian pada laporan keuangan. Pegawai hanya berfokus pada pertanggungjawaban atas penggunaan dana penelitian yang dilaksanakannya. Kesimpulan untuk produk laporan keuangan di Puslitjakdikbud adalah laporan

keuangan bermanfaat untuk keperluan keputusan manajemen terkait penganggaran dan evaluasi kinerja tetapi belum bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini pegawai, sebagai sarana akuntabilitas instansi.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui pendekatan model CIPP, pelaporan keuangan pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan secara umum sudah dijalankan dengan baik tetapi ada hal khusus yang perlu diperbaiki terkait dengan sistem kerja pada proses pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa masalah pengelolaan dan pencatatan keuangan dan BMN dalam pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud adalah kurangnya koordinasi antara pengelola keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, verifikator data keuangan, dan para operator aplikasi keuangan). Kurangnya koordinasi disebabkan karena kurangnya wadah komunikasi dari masing-masing pengelola. Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai pimpinan dalam bidang keuangan mengadakan rapat rutin koordinasi pelaporan keuangan setiap bulan.

Dalam rapat ini diketahui hasil pekerjaan dari setiap pengelola keuangan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara bersama-sama.

2. Hasil evaluasi input menunjukan bahwa pegawai yang bertugas dalam pelaporan keuangan keuangan sudah kompeten dalam menjalankan aplikasi keuangan. Tetapi pada pelaksanaannya, hasil evaluasi proses menunjukan bahwa masih ditemukannya pegawai yang belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan monitoring bulanan, triwulanan atau semesteran dengan cara mengadakan rapat penilaian kinerja pegawai dan membuat *checklist* tahapan penyelesaian pekerjaan sehingga dapat diketahui apabila terjadi kendala.
3. Hasil evaluasi proses menunjukan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) di Balitbang Kemendikbud masih belum optimal. Kepala Puslitjakdikbud melakukan pergantian personil SPI dengan pegawai yang berasal dari Jabatan Fungsional Umum sehingga sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai SPI.
4. Hasil evaluasi proses menunjukan bahwa pencatatan Barang Milik Negara (BMN) di Puslitjakdikbud masih belum tertib administrasi karena kurangnya jumlah dan tidak optimalnya kinerja pengurus dan operator aplikasi BMN. Kepala Puslitjakdikbud perlu melakukan penambahan staf di bidang pengurusan BMN sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan atau melaksanakan rotasi jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiyah, Nunuy Nur. 2010. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana
- Blocher, et. Al. 2010. *Cost Management A Strategic Emphasis. Fifth Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin..
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Darmawan, Didit. 2013. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Pena Semesta.
- Dess, et. al. 2012. *Strategic Management. Seventh Edition*. New York: McGraw-Hill Education.
- Erlina, 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Kedua*, Medan: USU Press.,
- Hadi, Samsul, 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Kadir, Abdul dan Triwahyuni, Terra Ch. *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukardi. 2012. *Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjandra, W.Riawan. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wirawan. 2016. *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Kota Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

B. Jurnal

- Agung, T.M., & Gayatri 2018. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem*, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 23, (2), 1253-1276.
- Amalia, Della Nurul. 2018. "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Basis Akrual pada Pemerintah Kota Banjar Baru dengan Model CIPP". *Jurnal Focus*, 8, (2), 103-136.
- Dermawan, et.al. 2016."Analisis Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5, 60-68.
- Ekienabor, Ehijiele. 2018. "The Influence of Employees' Commitment on Organizationaal Performance in Nigeria". *International Journal of Research Publications*, 8, (1), 1-14.

- Isa, Ahmed Adamu. 2017. “*The Impact of Computerized Accounting Information System on Management Performance in Public Sector in Nigeria: Problems and Prospects*”. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4, (12), 80-83.
- Ibrahim, et. al. 2017. “*The Impact of Internal Systems on Financial Performance: The Case of Health Institutions in Upper West Region of Ghana*”. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7, (4), 684-696.
- Mayasari, et. al. 2018. “*See More: Evaluation of Work Programs and Financial Performance of Local Government in Indonesia Through CIPP Model*”. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 09, (12), 21169-21178.
- Safkaur. et. al. 2019. “*The Effect of Quality Financial Reporting on Good Governance*”. *International Journal of economics and Financial Issues*. 9, (3), 277-286.
- Sumiyati, 2015. ”*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Studi pada SKKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir)*”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2, (2), 1-15.
- Trisaptya, et.al. 2016. “*Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16, 75-86.

C. Peraturan

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kemendikbud

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Lain-lain

Andre, Maria Mayella. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Herdianto, Deni. 2015. *Pengaruh Faktor Teknis dan Organisasional terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Pengelola Web Kemendikbud. *Lima Tahun Berturut-Turut, Kemendikbud Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*. Online. (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/>). Diakses 20 April 2019.

Setyabudi, Oktariawan. 2018. *Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Stufflebeam, D.L. 2003. *The CIPP Model for Evaluation*. The article presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluator Network (OPEN) 3 Oktober 2003.